

Tema: Kemandirian Pangan dan Sumber Daya Alam  
Sub Tema: Pengembangan Model Atau Kebijakan  
Terkait  
Kemandirian Pangan dan Sumberdaya Alam

**USULAN PENELITIAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
SKEMA PENELITIAN PERCEPATAN GURU BESAR**



**MODEL INTERELASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI  
KELAPA (*COCONUT INDUSTRY*) DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
PROVINSI RIAU**

**OLEH:**

<b>Ketua</b>	<b>: Dr. H. Seno Andri, M.Si</b>	<b>NIDN. 0025085706</b>
<b>Anggota</b>	<b>: Prof. Dr. H. Sujianto, M.Si</b>	<b>NIDN. 0028096201</b>
	<b>Drs. Endang Sutrisna, M.Si</b>	<b>NIDN. 0008096601</b>
	<b>Helen Susra, S.Sos</b>	<b>NIM . 1710246760</b>
	<b>Arif Budi Setiawan, S.AP</b>	<b>NIM . 1810246157</b>

**SUMBER DANA: DIPA LPPM UNIVERSITAS RIAU 2020**

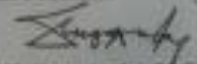
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS RIAU  
MARET, 2020**

## HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL PENELITIAN

- |    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| 1  | Judul Penelitian        | Model Interaksi Kebijakan Pengembangan Industri Kelapa (Coconut Industry) di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau |
| 2  | Ketua Penelitian        |  |
| a. | Nama Lengkap            | Dr. H. Seno Andri, M.Si  |
| b. | Jenis Kelamin           | Laki-Laki  |
| c. | NIDN                    | 0025085706   |
| d. | Jabatan Struktural      | -  |
| e. | Jabatan Fungsional      | Lektor Kepala  |
| f. | Fakultas/Jurusan        | FIISIP/ Ilmu Administrasi Bisnis   |
| g. | Alamat Kantor           | Kampus Fisip Jl. BinaWidya Panam Pekanbaru   |
| h. | Telp/Fax/email          | <a href="mailto:seno.andri@icloud.com">seno.andri@icloud.com</a>   |
| i. | Alamat Rumah            | Jl. Pegaya No. 3 Sukajadi, Pekanbaru   |
| j. | HP/Telp                 | 082387528067   |
| 3  | Anggota (1)             |  |
| a. | Nama Lengkap            | Prof. Dr. H. Sujanto, M.Si   |
| b. | Jabatan Fungsional      | Guru Besar   |
| c. | NIDN                    | 0028096201   |
|    | Anggota (2)             |  |
| a. | Nama Lengkap            | Drs. Endang Sutrisna, M.Si   |
| b. | Jabatan Fungsional      | 0008096601   |
| c. | NIDN                    | Lektor   |
|    | Anggota (3)             |  |
| a. | Nama Lengkap            | Helen Sumra, S.Sos   |
| b. | Keterangan              | Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Administrasi   |
| c. | NIM                     | 1710246760   |
|    | Anggota (4)             |  |
| a. | Nama Lengkap            | Arif Budi Setiawan, S.AP   |
| b. | Keterangan              | Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Administrasi   |
| c. | NIM                     | 1810246157   |
| 4  | Jangka Waktu Penelitian | 1 Tahun Penelitian   |
| 5  | Pembiayaan              |  |
| a. | Dana Diusulkan          | Rp. 100.000.000,-  |
| b. | Sumber Dana             | DIPA LPPM Universitas Riau Tahun 2020  |

Pekanbaru, 12 Maret 2020

Ketua Penelitian

  
 Dr. H. Seno Andri, M.Si  
 NIP. 195708251987021002

Menyetujui,  
 Ketua LPPM Universitas Riau

Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE.,MP  
 NIP. 196008221990021002

  
 Mengetahui,  
 Dekan FISIP Universitas Riau  
  
 Dr. Syahza Harjo, M.Si  
 NIP. 196709131993031001

## RINGKASAN RENCANA PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan model Interelasi Kebijakan Pengembangan Industri Kelapa (*Coconut Industry*) di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau melalui mekanisme trial and error dan Mengidentifikasi dan menganalisis penerimaan dan resistensi target group atas aplikasi model yang ditawarkan pada tahun pertama. Penelitian ini menggunakan pendekatan varian metode kualitatif dalam bentuk fenomenologi dengan teknik pengumpulan data Partisipatory Rural Appraisal (PRA), dalam PRA pengumpulan data menerapkan metode wawancara (*Indepth Interview*), pengamatan/observasi, diskusi kelompok terarah (FGD) merupakan kelengkapan dari teknik interview (trigulasi) sebagai upaya proses *Check and re-check*, kajian dokumen/data dan *Community Partiipation Monitoring* (CPM). Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis interaktif terhadap dinas perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir yang bergerak pada bidang Perkebunan. Hasil kajian tahun pertama memformulasi sebuah model Interelasi Kebijakan Pengembangan Industri Kelapa (*Coconut Industry*) di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Dimensi Interelasi Kebijakan Pengembangan akan diidentifikasi dalam pelaksanaannya oleh stakeholders.

## IDENTITAS ANGGOTA KEGIATAN PENELITIAN

### 1. Ketua Tim

- a.
- b. Nama Lengkap : Dr. H. Seno Andri., M.Si
- c. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- d. NIP / NIDN : 0025085706
- e. Golongan/Pangkat/Jabatan : IVb / - / Lektor Kepala
- f. Disiplin Ilmu : Ilmu Administrasi Bisnis
- g. Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- h. Perguruan tinggi : Universitas Riau
- i. Bidang Keahlian : Manajemen Sumber Daya Manusia
- j. Waktu untuk pembinaan : 12 Jam / Minggu

### 2. Anggota 1

- a. Nama Lengkap : Prof. Dr. H. Sujianto, M.Si
- b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- c. NIP / NIDN : 1003108801
- d. Golongan/Pangkat/Jabatan : -
- e. Disiplin Ilmu : Ilmu Administrasi Negara
- f. Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- g. Perguruan tinggi : Universitas Riau
- h. Bidang Keahlian : Kebijakan Publik
- i. Waktu untuk pembinaan : 10 Jam / Minggu

### 3. Anggota 3

- a. Nama Lengkap : Drs. Endang Sutrisna, M.Si
- b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- c. NIP / NIDN : 0008096201
- d. Golongan/Pangkat/Jabatan : IIIId/ Lektor
- e. Disiplin Ilmu : Administrasi Bisnis
- f. Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- g. Perguruan tinggi : Universitas Riau
- h. Bidang Keahlian : Keuangan dan Pemasaran
- i. Waktu untuk pembinaan : 10 Jam / Minggu

### 4. Anggota 5

- a. Nama Lengkap : Helen Susra
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. NIM : 1710246760

- d. Golongan/Pangkat/Jabatan : -
- e. Disiplin Ilmu : Ilmu Administrasi Bisnis (S2)
- f. Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- g. Perguruan tinggi : Universitas Riau
- h. Bidang Keahlian : -
- i. Waktu untuk pembinaan : 8 Jam / Minggu

**5. Anggota 6**

- a. Nama Lengkap : Arif Budi Setiawan
- b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- c. NIM : 1810246157
- d. Golongan/Pangkat/Jabatan : -
- e. Disiplin Ilmu : Ilmu Pemerintahan
- f. Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- g. Perguruan tinggi : Universitas Riau
- h. Bidang Keahlian : -
- i. Waktu untuk pembinaan : 8 Jam / Minggu

## DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	
Ringkasan Rencana Penelitian	
Identitas Anggota Kegiatan Penelitian	
Daftar Isi	

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN .....	1
B. PERUMUSAN MASALAH .....	7
C. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN.....	7
D. LUARAN/ MANFAAT PENELITIAN.....	8
E. TINJAUAN PUSTAKA .....	8
1. Tinjauan Teoritik .....	10
2. Roadmap .....	20
F. METODE PENELITIAN.....	20
1. Metode Penelitian .....	20
2. Setting Penelitian .....	21
3. Teknik Pengumpulan Data .....	22
4. Teknik Analisis Data.....	23
5. Tingkat Kesiapterapan Teknologi.....	23
G. JADWAL KEGIATAN .....	24
H. DAFTAR PUSTAKA .....	24
I. REKAPITULASI BIAYA .....	25
J. SUSUNAN ORGANISASI DAN PEMBAGIAN TUGAS TIM .....	25
K. JUSTIFIKASI ANGGARAN .....	26

## A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan kabupaten yang memiliki sumber daya alam perkebunan yang berlimpah terutama perkebunan kelapa (kopra), Kabupaten ini terbentuk setelah dirasa persyaratan administrasinya terpenuhi dan masyarakat Indragiri Hilir memohon kepada Menteri Dalam negeri melalui Gubernur Riau, agar Indragiri Hilir dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II yang berdiri sendiri (otonom). Setelah melalui penelitian, baik oleh Gubernur maupun Departemen Dalam Negeri, maka pemekaran diawali dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau (Provinsi Riau) tanggal 27 April 1965 Nomor 052/5/1965 sebagai Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir.

Pada tanggal 14 Juni 1965 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 49, maka Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir resmi dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (sekarang Kabupaten Indragiri Hilir) yang berdiri sendiri, yang pelaksanaannya terhitung tanggal 20 November 1965.

Kabupaten Indragiri Hilir terletak di pantai Timur Pulau Sumatera, merupakan gerbang selatan Provinsi Riau, dengan luas daratan 11.605,97 km<sup>2</sup> dan perairan 7.207 km<sup>2</sup> berpenduduk kurang lebih 983.354 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis, Indragiri Hilir yang sebelumnya dijuluki “Negeri Seribu Parit” yang sekarang terkenal dengan julukan “**Negeri Seribu Jembatan**” dikelilingi perairan berupa sungai-sungai besar dan kecil, parit, rawa-rawa dan laut, secara fisiografis Kabupaten Indragiri Hilir beriklim tropis merupakan sebuah daerah yang terletak di ketinggian 0-4 meter di atas permukaan laut dan dipengaruhi oleh pasang surut.

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu daerah sentra penghasil kelapa di Indonesia, serta berpotensi menjadi hamparan kebun kelapa terluas di Dunia. Di Kabupaten Indragiri Hilir pohon-pohon kelapa tumbuh dengan suburnya dari lahan-lahan yang semula hutan rawa-rawa gambut. Kontribusi perkebunan kelapa dari INHIL menjadikan Indonesia secara keseluruhan sebagai sentra perkebunan kelapa terbesar di dunia. Sebagai negara pemilik kebun terluas di dunia, Indonesia mempunyai perkebunan seluas 3,7 juta hektar yang tersebar di kepulauan kelapa. Provinsi Riau areal perkebunan kelapa yang cukup luas, kurang lebih 579.399 hektar, sekitar 80 % berada di Kabupaten Indragiri Hilir.

Perkebunan kelapa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir secara Umum merupakan kelapa rakyat seluas 384.095 hektar dengan produksi sebanyak 294.148 ton kopra/tahun dan melibatkan sebanyak 78.512 kelapa keluarga petani. Sedangkan perkebunan kelapa skala perusahaan yang merupakan perkebunan swasta nasional (PT. Pulau Sambu Group) seluas 73.758 hektar dengan produksi 124.805 ton kopra/tahun (Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019). Berikut data area Perkebunan kelapa, tingkat produksi dan petani di Kabupaten Indragiri Hilir :



**Tabel 1.1 Luas Areal, Produksi, dan Jumlah Petani Pemilik Perkebunan Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019**

<b>No</b>	<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Luas Areal (Ha)</b>	<b>Produksi (Ton)</b>	<b>Jumlah Petani (KK)</b>
1.	Enok	44118	30219	9004
2.	Mandah	55216	45439	11374
3.	Kuindra	25721	14566	5249
4.	Tembilahan	9092	9606	1856
5.	Tanah Merah	10821	12968	2208
6.	Sungai Batang	14052	7844	2868
7.	Pelangiran	15728	15860	3210
8.	Kemuning	19	169	24
9.	Tempuling	10159	7411	2073
10.	Teluk Belengkon	3524	6055	719
11.	Reteh	24993	17628	5101
12.	Pulau Burung	10879	9771	2220
13.	Keritang	26967	25868	5503
14.	Kempas	6100	5323	1245
15.	Kateman	37689	28802	7692
16.	Gaung	28956	18647	5909
17.	Gaung Anak Serka	15381	7656	3139
18.	Concong	14166	8607	2891
19.	Batang Tuaka	24391	18746	4978
20.	Tembilahan Hulu	3645	3793	744
<b>Jumlah</b>		<b>381617</b>	<b>294978</b>	<b>78007</b>

Sumber: Dinas Pekebunan Kab. Inhil Tahun 2019

Dari tabel diatas, bisa dilihat hamper di semua wilayah kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir memiliki perkebunan kelapa yang sangat luas, tetapi hal ini tidak diikuti oleh hasil produksi yang baik. Dapat dilihat bahwa luas perkebunan di Kabupaten Indragiri Hilir sangat luas, tetapi hal itu tidak diikuti dengan hasil produksi yang baik, maka dari itu peran pemerintah dalam pengambilan kebijakan Kabupaten Indragiri Hilir terhadap Industri Kelapa dibutuhkan guna menyelamatkan nasib para petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir.

Komoditas kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir masih dapat dikembangkan mengingat lahan yang tersedia untuk pengembangan masih cukup luas yaitu mencapai 210.283 hektar (Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Indragiri Hilir) dan secara umum sector kelapa merupakan mata pencaharian utama masyarakat daerah ini. Walaupun perkebunan kelapa (kopra) di INHIL dikelola dengan baik oleh para pekebun, namun pemasaran hasil perkebunan kelapa mengalami naik turun sehingga posisi tawar para petani sangat rendah dalam menentukan harga, karena mereka tergantung dengan pembelian oleh pihak swasta (PT. Pulau Sambu Group). Hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir belum mengeluarkan regulasi khusus tentang perkebunan kelapa di INHIL serta terlalu memberikan kebebasan kepada perusahaan yang bergerak di bidang perkelapaan untuk membuat kebun sendiri bagi pasokan bahan baku industrinya. Sehingga ketika pihak perusahaan telah mampu ‘mandiri’ dengan hasil kebun mereka sebagai bahan baku industrinya, mereka akan menekan harga pembelian kelapa petani. Berikut data harga kelapa (-/kilo) dari tahun 2017-sekarang :

**Tabel 1.2 Daftar Harga Kelapa dari Tahun 2017 Sampai Sekarang**

No	Nama Bulan	Tahun (kilo)			
		2017	2018	2019	2020
1	Januari	Rp. 800	Rp. 1500	Rp. 650	Rp. 2200
2	Februari	Rp. 800	Rp. 1550	Rp. 500	Rp. 2200
3	Maret	Rp. 650	Rp. 1700	Rp. 450	Rp. 2400
4	April	Rp. 650	Rp. 1400	Rp. 450	
5	Mei	Rp. 900	Rp. 1300	Rp. 550	
6	Juni	Rp. 700	Rp. 1150	Rp. 700	
7	Juli	Rp. 1000	Rp. 1000	Rp. 700	
8	Agustus	Rp. 1000	Rp. 900	Rp. 1000	
9	September	Rp. 1100	Rp. 900	Rp. 900	
10	Oktober	Rp. 1200	Rp. 750	Rp. 1300	
11	November	Rp. 1200	Rp. 800	Rp. 1250	
12	Desember	Rp.1200	Rp. 650	Rp. 1700	

*Sumber: Dinas Perkebunan INHIL, 2019*

Belum adanya fasilitas pasar yang memadai mengakibatkan harga kelapa menjadi tidak terkendali. Monopoli pasar kelapa yang dilakukan oleh PT. Pulau Sambu Group membuat para petani sangat tertekan dan mendesak Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk segera membuat sebuah kebijakan yang berpihak terhadap nasib petani, langkah ini guna penyelamatan nasib para petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir. Selain itu pihak Pemerintah Kabupaten dan DPRD Indragiri Hilir juga diminta membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang perkelapaan di INHIL, terutama terkait mekanisme tata niaga dan harga kelapa. Belum adanya BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) menjadi salah satu masalah dalam memasarkan produk kepala petani. Sebenarnya melalui peran Pemerintah terutama dengan pembentukan BUMD dapat memutus mata rantai monopoli yang dilakukan oleh pihak PT. Pulau Sambu Group, sehingga pemerintah bisa menentukan harga kelapa yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan, dan juga hal ini dapat

mempermudah masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir untuk menjual hasil panen kelapanya tentunya dengan harga yang sesuai standar yang telah ditentukan.

Selain itu, lemahnya keberpihakan pemerintah terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran distribusi hasil pertanian turut mendorong rendahnya nilai jual produk perkebunan kelapa petani di Kabupaten Indragiri Hilir. Seharusnya dengan penyediaan sarana jalan yang baik, perlabuhan yang baik akan turut serta meningkatkan daya saing produk kelapa petani. Akan tetapi, kenyataan dari beberapa tahun terakhir nilai jual produk petani di Kabupaten Indragiri Hilir semakin rendah, pada bulan Maret tahun 2019 tercatat bahwa nilai jual kelapa berada pada posisi terendah sebesar Rp. 450,-/kilo. Kondisi itu tentu saja membuat para petani kelapa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selain masalah di atas, belum adanya asosiasi berupa koperasi maupun kelompok tani membuat petani kelapa tidak dapat mengetahui perkembangan pasar. Alternative lain dari penjualan hasil perkebunan kelapa adalah mendistribusikan hasil perkebunan kelapa ke pasar-pasar tradisional dan pasar daerah lain tapi bukan untuk industry. Oleh sebab itu, perlunya pemihakan pemerintah pada dasarnya adalah untuk melindungi hasil perkebunan kelapa milik masyarakat. Pemihakan itu dapat berupa perbaikan infrastruktur, regulasi, maupun fasilitasi dalam bentuk lainnya sehingga petani kelapa tidak tergerus oleh monopoli perusahaan maupun pedagang (baca-tauke kelapa). Berdasarkan uraian itu, peneliti memperhatikan bahwa peran Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengambil kebijakan Pengembangan dan mengelola perkelapaan sangat mendesak, selain itu besarnya potensi kelapa sebagai salah satu

sumber pendapatan daerah juga sangat besar. Untuk itu penulis tertarik melakukan kajian mengenai potensi industri kelapa di INHIL dengan judul : **Model Interelasi Kebijakan Pengembangan Industri Kelapa (*Coconut Industry*) di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.**

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah dipaparkan maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengembangan Industri Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pengembangan industri kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau?
3. Bagaimana model interelasi kebijakan pengembangan industri kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau?

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan perumusan masalah penelitian yang telah dipaparkan maka peneliti bermaksud bertujuan penelitian sebagai berikut:

1. Identifikasi pengembangan industri kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau ?
2. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pengembangan industri kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau ?
3. Menemukan model interelasi kebijakan pengembangan industri kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau ?

#### **D. LUARAN/MANFAAT PENELITIAN**

Rencana target Luaran sebagai berikut:

1. Laporan Akhir
2. Artikel ilmiah untuk dipublikasikan Pada Jurnal Internasional Terindeks Scopus (Q2)
3. Seminar Internasional (Prosiding)
4. Ringkasan Eksekutif disertai Gambar
5. Salah satu bahan materi ajar atau bahan ajar
6. Membuat model kebijakan (sebagai formulasi kebijakan)
7. Referensi tugas akhir mahasiswa (draf skripsi)
8. Hak cipta

#### **E. TINJAUAN PUSTAKA**

##### **1. Kerangka Teoritik**

Kebijakan public merupakan sebuah disiplin ilmu social terapan yang menggunakan berbagai metode kebijakan public dengan argument untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah kebijakan. Ditegaskan juga bahwa implementasi kebijakan adalah kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu rangkaian tindakan yang mempunyai tujuan, nilai-nilai, dan praktek-praktek yang terarah dimana dilaksanakan oleh

seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan untuk memecahkan suatu permasalahan.

Menurut Agus Dwiyanto,<sup>1</sup> tahapan pembuatan agenda kebijakan adalah langkah pertama yang sangat penting dalam proses pembuatan suatu kebijakan. Tahapan ini bahkan sering disebut langkah kunci yang harus dilalui sebelum suatu isu kebijakan diangkat dalam agenda kebijakan pemerintah dan akhirnya menjadi suatu kebijakan. Selanjutnya apabila suatu isu telah masuk dalam agenda kebijakan pemerintah, maka isu itu telah menjadi benar-benar masalah publik yang dapat dipecahkan melalui tindakan kebijakan. Meskipun *agenda setting* merupakan suatu tahapan yang paling penting, akan tetapi seringkali kita mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi apakah suatu masalah telah masuk dalam tahapan ini. Menurut Peters (Dwiyanto, 1995),<sup>2</sup> *agenda setting* merupakan tahapan paling abstrak dan tidak mempunyai bentuk yang jelas dibanding dengan tahapan yang lain dalam proses pembuatan kebijakan. Oleh karena sifat *agenda setting* yang demikian, maka setiap masalah akan melalui tahapan *agenda setting* yang berbeda-beda. Hal ini sangat tergantung pada siapa yang melontarkan isu kebijakan dan jenis isu yang akan diangkat menjadi agenda kebijakan.

Berdasarkan tingkat perhatian kebijakan yang diberikan pemerintah terhadap masalah yang diangkat menjadi isu kebijakan, sementara itu Cobbs dan Elder,<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Agus Dwiyanto. 1995. *Manfaat Pengembangan Studi Kebijakan Publik untuk Pembangunan Daerah*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Analisis Kebijakan Sosial, Pusat Penelitian Kependudukan UGM: Yogyakarta. 2

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 2

<sup>3</sup> Cobbs dan Elder (dalam Budi Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. MedPress: Yogyakarta, hal. 14)

membagi agenda kebijakan menjadi dua macam, yakni agenda sistemik dan agenda lembaga atau pemerintah. Agenda sistemik terdiri dari semua isu yang menurut pandangan anggota-anggota masyarakat politik pantas mendapat perhatian publik dan mencakup masalah-masalah dalam yurisdiksi wewenang pemerintah yang secara sah ada. Agenda sistemik terdapat dalam setiap sistem politik di baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Agenda sistemik pada dasarnya merupakan agenda pembahasan. Tindakan mengenai suatu masalah hanya akan ada bila masalah tersebut diajukan kepada lembaga pemerintah dengan suatu kewenangan untuk mengambil tindakan yang pantas. Agenda lembaga atau pemerintah terdiri dari masalah-masalah yang mendapat perhatian sungguh-sungguh dari para pejabat pemerintah.

Menurut Cobb dan Elder, ada tiga prasyarat agar isu kebijakan dapat masuk atau tampil dalam agenda sistemik, yaitu

“(1) isu itu memperoleh perhatian yang lebih luas atau setidaknya-tidaknya dapat menimbulkan kesadaran masyarakat, (2) adanya persepsi dan pandangan atau pendapat publik yang luas bahwa beberapa tindakan perlu dilakukan untuk memecahkan masalah itu, dan (3) adanya persepsi yang sama dari masyarakat bahwa masalah itu adalah merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab yang sah dari beberapa unit pemerintahan untuk memecahkannya”.<sup>4</sup>

David Truman, menjelaskan mengapa suatu masalah mencapai status agenda, atau dengan kata lain apa yang mendorong suatu masalah publik berubah menjadi isu politik yang hidup. Truman menjelaskan hal ini sebagai usaha dari pada setiap kelompok kepentingan untuk mempertahankan diri dalam keadaan *equilibrium* yang layak dan jika sesuatu mengancam kondisi ini maka mereka akan beraksi

---

<sup>4</sup> Cobb dan Elder, *Ibid.*, hal. 16



menyesuaikan dengan *equilibrium*.<sup>5</sup> Anderson,<sup>6</sup> menyebutkan beberapa faktor yang dapat menyebabkan *public problems* masuk ke dalam agenda pemerintah yaitu:

1. Kepemimpinan dan kepentingan politik merupakan suatu faktor penting dalam penyusunan agenda.
2. Suatu isu publik juga akan dapat masuk dalam agenda kebijakan kalau isu tersebut merupakan akibat dari krisis atau peristiwa yang ketat.
3. Perhatian media komunikasi melalui reportasenya sehingga pembuat kebijakan tertuju pada masalah atau isu-isu tadi.

Eyestone, secara sistematis menguraikan bagaimana proses suatu isu diangkat menjadi agenda kebijakan dan selanjutnya menjadi kebijakan yang diambil pemerintah.<sup>7</sup> Keterlibatan pemerintah dalam membuat agenda kebijakan dapat dibagi menjadi tiga kategori (Jones,1994:115-119), yakni:

- a. Membiarkan masalah terjadi (*let it happen*). Dalam hal ini pemerintah bersifat pasif dalam perumusan suatu agenda. Pemerintah hanya menjaga berbagai saluran akses dan komunikasi berjalan dengan lancar.
- b. Mendorong terjadinya perumusan masalah (*encourage it to happen*). Pemerintah dalam hal ini membantu masyarakat dalam mendefinisikan dan mengartikulasikan masalah-masalah yang mereka hadapi.
- c. Membuat perumusan masalah tersebut terjadi (*make it happen*). Pemerintah secara aktif berperan dalam mendefinisikan dan menyusun serangkaian

---

<sup>5</sup> David Truman (dalam Budi Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. MedPress: Yogyakarta, hal. 49)

<sup>6</sup> Anderson (dalam M Irfan Islamy. 2001. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara: Jakarta, hal. 114)

<sup>7</sup> Randall B Ripley. 1985. *Policy Analysis in Political Science*, Nelson-Hall Publishers Chicago.

tujuan yang ingin dicapai. Pada kategori ini, pemerintah tidak lagi menunggu hingga timbulnya tuntutan-tuntutan. Mereka secara sistematis meninjau peristiwa dalam masyarakat beserta segala efeknya dan memasukkannya dalam agenda tindakan pemerintah.

b. Perumusan Usulan Kebijakan

Setelah *public problem* dapat dimasukkan dalam agenda pemerintah, maka langkah selanjutnya dalam proses perumusan kebijakan publik adalah perumusan usulan-usulan kebijakan (*policy proposals*). Perumusan usulan kebijakan adalah kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah yang meliputi kegiatan mengidentifikasi alternatif, mendefinisikan dan merumuskan alternatif, menilai masing-masing alternatif yang tersedia dan memilih alternatif yang “memuaskan” atau “paling memungkinkan untuk dilaksanakan”.<sup>8</sup>

i. Mengidentifikasi alternatif

*Public problem* yang telah dengan jelas dirumuskan dan pembuat kebijakan telah sepakat untuk memasukkannya ke dalam agenda pemerintah, berarti telah siap untuk dibuatkan usulan kebijakan untuk memecahkan masalah tadi. Sebelum pembuat kebijakan merumuskan usulan kebijakan, maka terlebih dahulu harus melakukan identifikasi terhadap alternatif-alternatif untuk kepentingan masalah tersebut. Pemberian identifikasi yang benar dan jelas pada

---

<sup>8</sup> M Irfan Islamy. 2001. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara: Jakarta, hal. 92

setiap alternatif kebijakan akan mempermudah proses perumusan alternatif tersebut.<sup>9</sup>

ii. Mendefinisikan dan merumuskan alternatif.

Tujuan dari kegiatan ini adalah agar masing-masing alternatif yang telah dikumpulkan oleh *decision maker* nampak dengan jelas pengertiannya. Semakin jelas alternatif suatu alternatif didefinisikan semakin mudah pembuat kebijakan menilai dan mempertimbangkan aspek positif dan negatif dari masing-masing alternatif tersebut. Sebaliknya alternatif yang tidak dapat didefinisikan atau dirumuskan dengan baik maka akan tidak dapat dipakai secara baik sebagai alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah.

iii. Menilai alternatif

Menilai alternatif adalah kegiatan pemberian bobot pada setiap alternatif, sehingga nampak dengan jelas bahwa setiap alternatif mempunyai nilai bobot kebaikan dan kekurangannya masing-masing. Dengan demikian maka *decision maker* akan mengambil sikap untuk menentukan alternatif mana yang lebih memungkinkan untuk dilaksanakan berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan.

iv. Memilih alternatif yang “memuaskan”

Proses pemilihan alternatif yang “memuaskan” atau “yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan” baru dapat dilakukan setelah pembuat kebijakan berhasil dalam melakukan penilaian terhadap alternatif-alternatif kebijakan. Suatu alternatif yang dipilih akan menjadi suatu usulan kebijakan yang telah diantisipasi untuk dapat dilaksanakan. Tahap pemilihan alternatif ini

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 93

akan selalu didasarkan pada pertimbangan terhadap kepentingan berbagai *stakeholders* yang akan memperoleh pengaruh sebagai konsekuensi dari pemilihan alternatif tersebut.

c. Pengesahan Kebijakan (Ratifikasi)

Proses pengesahan kebijakan biasanya diawali dengan kegiatan *persuasion* dan *bargaining*. *Persuasion* menurut Anderson, adalah usaha-usaha untuk meyakinkan orang lain tentang sesuatu kebenaran atau nilai kedudukan seseorang sehingga mereka mau menerimanya sebagai miliknya sendiri. Kegiatan *bargaining* dapat diartikan sebagai suatu proses dimana dua orang atau lebih yang mempunyai kekuasaan atau otoritas mengatur atau menyesuaikan sedikit-tidaknya sebagian tujuan-tujuan yang tidak mereka sepakati agar dapat merumuskan serangkaian tindakan yang dapat diterima bersama tetapi tidak perlu terlalu ideal bagi mereka.<sup>10</sup> Setelah suatu rancangan kebijakan diformulasikan dengan baik maka kebijakan tersebut haruslah sah, haruslah diberi “*legitimacy*”. Pengesahan atau pemberian “*legitimacy*” itu hanyalah oleh lembaga atau pejabat yang berwenang, yang menurut hukum mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukannya.<sup>11</sup> Dengan demikian maka suatu kebijakan pemerintah akan mempunyai kekuatan hukum dan oleh karena itu diumumkan kepada masyarakat atau kepada yang bersangkutan sehingga dapat dipaksakan berlakunya.

---

<sup>10</sup> Anderson (dalam M Irfan Islamy. 2001. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara: Jakarta, hal. 95)

<sup>11</sup> Soenarko, 1998. *Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*. Papyrus: Surabaya, hal. 197

## **b. Aktor dalam Proses Kebijakan**

Aktor merupakan pelaku yang terlibat dalam proses kebijakan. Aktor yang paling dominan dalam proses kebijakan disebut *policy maker*, sementara itu aktor yang mempunyai kualifikasi atau karakteristik lain dengan tuntutan *ekstern* dikenal sebagai kelompok-kelompok kepentingan, partai politik dan elit profesi. Keterlibatan aktor dalam proses kebijakan publik dijelaskan oleh William D. Coplin dan Michael K.O'Leary,<sup>12</sup> dengan mengembangkan suatu metode analisis politik untuk dapat diterapkan dalam proses kebijakan yang disebut *PRINCE*, yaitu *Probe* artinya menggambarkan siapa yang merupakan aktor terpenting dalam kaitannya dengan alternatif kebijakan tertentu, *Interact* artinya mencari keinginan (preferensi) dan pengaruh masing-masing aktor tersebut dalam pengambilan keputusan, *Calculate*, artinya melakukan perkiraan atau perhitungan terhadap keinginan dan pengaruh aktor-aktor tersebut, *Execute*, artinya melaksanakan sesuai dengan hasil perhitungan tersebut. Untuk melakukan analisis, disusun terlebih dahulu beberapa kriteria penting yaitu:<sup>13</sup>

“(1) *issue position*, yaitu menilai sampai berapa jauh seorang aktor mendukung, menentang atau netral terhadap suatu alternatif, (2) *salience*, yaitu menilai sampai seberapa jauh suatu alternatif itu penting bagi masing-masing aktor, (3) *power*, yaitu menilai sampai seberapa jauh seorang aktor mampu memblokir atau sebaliknya merealisasikan keputusan tentang alternatif tertentu (4) *friendship-neutrality-hostility*, yaitu menilai sampai seberapa jauh hubungan antar aktor, apakah saling mendukung, atau malah bertentangan atau bermusuhan sehingga dapat mempengaruhi adopsi atau implementasi suatu kebijakan tertentu”.

---

<sup>12</sup> William D. Coplin dan Michael K.O'Leary (dalam Yeremias T Keban, 1995, *Analisis Peran Dalam Seleksi Alternatif Kebijakan*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Analisis Kebijakan Sosial, Pusat Penelitian Kependudukan UGM Yogyakarta)

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 4

Aktor-aktor atau pemeran serta dalam proses kebijakan dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yakni para pemeran serta resmi dan para pemeran serta tidak resmi.<sup>14</sup> Pemeran serta resmi adalah agen-agen pemerintah (birokrasi), presiden (eksekutif), legislatif dan yudikatif, sedangkan yang termasuk dalam kelompok pemeran serta tidak resmi meliputi kelompok-kelompok kepentingan, partai politik dan warga negara individu.

Model atau bentuk perumusan kebijakan diperlukan dalam melihat pola perumusan kebijakan yang dilakukan dalam suatu institusi. Pada dasarnya ada tiga belas macam model perumusan kebijakan, yaitu:<sup>15</sup>

1. Model kelembagaan
2. Model Proses
3. Model Kelompok
4. Model Elit
5. Model Rasional
6. Model Inkremental
7. Model Teori Permainan
8. Model Pilihan Publik
9. Model Sistem
10. Model Pengamatan Terpadu
11. Model Demokratis
12. Model Strategis

---

<sup>14</sup> Budi Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. MedPress: Yogyakarta, hal. 84

<sup>15</sup> Riant D Nugroho. 2009. *Public Policy*. Gramedia: Jakarta, hlm. 396

### 13. Model Deliberatif

Kesemua model perumusan kebijakan di atas dapat dipergunakan untuk menganalisis perumusan kebijakan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan. Dalam kasus kebijakan sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi, komunikasi dan keterbukaan di Provinsi Riau Tahun 2015, maka dari tiga belas model formulasi kebijakan di atas penyusunan kebijakan sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi, komunikasi dan keterbukaan tahun 2015 dianalisis dengan model kelompok.

Model pengambilan kebijakan teori kelompok menurut Riant Nugroho,<sup>16</sup> mengandaikan kebijakan sebagai titik keseimbangan. Inti gagasannya adalah bahwa interaksi dalam kelompok akan menghasilkan keseimbangan, dan keseimbangan adalah yang terbaik. Di sini individu dalam kelompok-kelompok kepentingan berinteraksi baik secara formal maupun informal, dan secara langsung atau melalui media massa menyampaikan tuntutananya kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan publik yang diperlukan. Model teori kelompok sesungguhnya merupakan abstraksi dari proses formulasi kebijakan yang di dalamnya beberapa kelompok kepentingan berusaha mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara interaktif. Lebih lanjut Riant Nugroho menyatakan bahwa peran sistem politik dalam konteks model teori kelompok ini memiliki peran untuk memanajemeni konflik yang muncul dari adanya perbedaan tuntutan, melalui cara-cara berikut:<sup>17</sup>

- a. Merumuskan aturan main antar-kelompok kepentingan.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, Hlm 399-400

<sup>17</sup> *Ibid.*, Hlm 400

- b. Menata kompromi dan menyeimbangkan kepentingan.
- c. Memungkinkan terbentuknya kompromi dalam kebijakan publik (yang akan dibuat), dan
- d. Memperkuat kompromi-kompromi tersebut.

Dalam Teori Model kelompok harus melakukan hal-hal berikut ini agar kelompoknya dapat dinamis dan efektif mencapai tujuannya;

A. Mengidentifikasi dan menganalisa kelompok beserta tujuannya.

- 1. Bagaimana keadaan kelompok yang dipimpinnya
- 2. SWOT analysis (*Strength, Weakness, Opportunities, Threat*)
- 3. Sifat-sifat khusus dari kelompok
- 4. Apa tujuan yang ingin atau harus dicapai kelompok.
- 5. Apa tujuan individu-individu yang menonjol
- 6. Apa strategi untuk bisa mencapai tujuan kelompok

B. Membangun struktur kelompok.

- 1. Pengaturan kelompok
- 2. Pembatasan dan pembagian peranan/tugas
- 3. Pengaturan hubungan-hubungan dalam kelompok

C. Inisiatif.

- 1. Memasukkan gagasan-gagasan baru kedalam kelompok.
- 2. Menciptakan kegiatan-kegiatan untuk kelompok.
- 3. Gagasan tak perlu harus berasal dari pemimpin, tetapi dalam keadaan tak ada gagasan dari kelompok, pemimpin harus siap dengan sesuatu gagasan, agar kelompok selalu mempunyai kegiatan.



D. Pencapaian tujuan.

1. Selalu memotivasi kelompok untuk mencapai tujuan.
2. Menjadi motor penggerak dalam mencapai tujuan

E. Mempermudah Komunikasi Dalam Kelompok

1. Komunikasi antar anggota harus lancar dan mudah.
2. Pengarahan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi.

F. Mempersatukan kelompok (*viscidity*).

1. Menciptakan kesatuan kelompok.
2. Menciptakan rasa persatuan dalam kelompok

G. Menciptakan suasana yang menyenangkan (*hedonic tone*)

1. Ciptakan kebahagiaan dalam kelompok.
2. Buat agar anggota merasa senang dan bahagia menjadi bagian dari kelompok

H. Ciptakan keterpaduan kelompok (*syntality*).

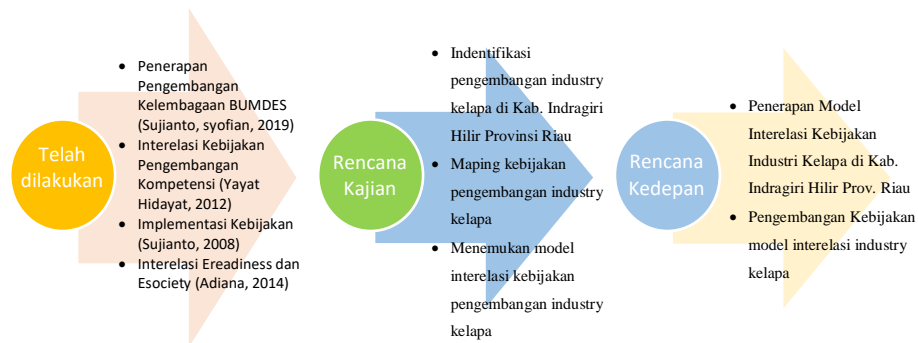
1. Kebersamaan dalam kelompok: dinamika, temperamen, kemampuan berbuat.
2. Galang kekompakan kelompok
3. Kegiatan yang terpadu dan terkoordinasi.
4. Menyangkut moral (semangat).

I. Mengimplementasikan philosophy.

1. Segala tindakan dilandasi oleh nilai-nilai yang dianut.
2. Konsekuen pada nilai-nilai dan cita-cita awal.

Model kelompok dapat dipergunakan untuk menganalisis proses pembuatan kebijakan: menelaah kelompok-kelompok apakah yang saling berkompetisi utk mempengaruhi pembuatan kebijakan dan siapakah yg memiliki pengaruh paling kuat terhadap keputusan yang dibuat. Pada tingkat implementasi, kompetisi antar kelompok juga merupakan salah satu faktor yg menentukan efektifitas kebijakan dalam mencapai tujuan. Jadi kesimpulannya, kebijaksanaan negara, menurut model ini adalah merupakan keseimbangan yang dicapai dari perjuangan kelompok yang berbeda-beda. Berdasarkan tinjauan literature dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengembangan industry kelapa dibutuhkan agar kelembagaan petani dalam bidang perkebunan dapat mengakses kebijakan pengembangan industry kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi riau berdasarkan dimensi Kebijakan Pengembangan.

## 2. Roadmap Penelitian



## F. METODE PENELITIAN

### 1. Desain Penelitian

Desain kajian ini dirancang menggunakan varian metode kualitatif dalam bentuk fenomenologi. Ini didasari bahwa selama ini masyarakat sebagai sasaran program pembangunan ditempatkan sebagai pihak yang tidak tahu dan tidak

memahami permasalahan yang dihadapi, tidak memiliki kemampuan, program diturunkan dari atas ke bawah berupa paket-paket program sehingga masyarakat semata sebagai obyek pembangunan, dan seringkali sebatas sebagai penonton atas pelaksanaan pembangunan yang berlangsung di sekitarnya. Proses pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan pemerintah hendak merubah pola tersebut, karena kebijakan pengembangan industri kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang selama ini telah dilaksanakan berdampak pada ketidakcocokan antara pemrakarsa program dengan masyarakat, akibatnya program pembangunan menjadi tidak berkelanjutan, tidak memperoleh dukungan dari masyarakat bahkan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru di masyarakat. Atas dasar itulah kajian ini didesain dengan pendekatan kualitatif yang bervariasi pada fenomenologi.

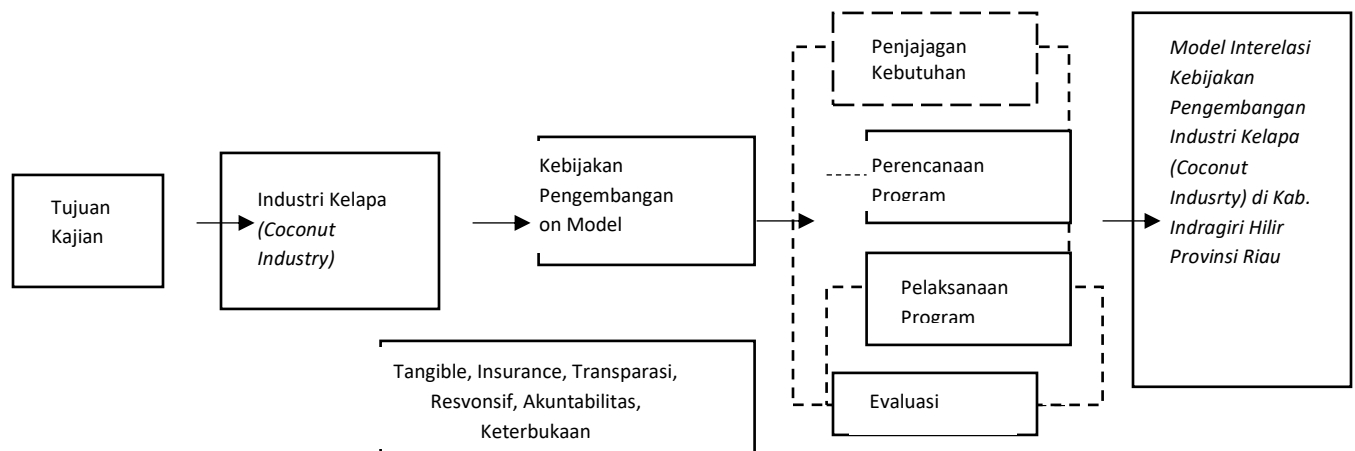
## **2. Setting Penelitian**

*Setting* penelitiannya adalah di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau khusus nya pada Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dalam memberikan kebijakan pengembangan industri kelapa kepada petani kelapa di kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini menjadikan sumber daya manusia (baik individu maupun kelompok/komunitas) sebagai *entry point*-nya. Oleh karena itu, diterapkan purposive sampling dalam pengambilan subyek penelitian yang tepat dan relevan dengan tujuan penelitian ini. Adapun yang menjadi subyek penelitian adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam kajian ini, menggunakan teknik Partisipatory Rural Appraisal (PRA). Dalam PRA metode pengumpulan data biasanya menerapkan metode: Wawancara (*Indepth Interview*), Pengamatan/Observasi, Diskusi Kelompok Terarah (FGD) merupakan kelengkapan dari teknik interview (trigulasi) sebagai upaya proses *check and re-check*), Kajian dokumen/data dan *Community Participation Monitoring* (CPM).

Teknik teknik PRA ini akan sangat baik bilamana dapat diterapkan untuk mencari dan mengembangkan model pemberdayaan masyarakat, karena dapat diperoleh banyak informasi yang dibutuhkan guna mencapai tujuan program serta menghindari kesalahan yang sama pada program-program sebelumnya. Teknik PRA dioperasikan dengan melibatkan orang untuk berpartisipasi dalam menilai, menemu-kenali dan memahami suatu yang dibutuhkan secara cepat dan secara bersama-sama melakukan penilaian serta mencari solusi atas masalah yang ditemukan/dihadapi. Pendekatan PRA dimaksudkan untuk mengembangkan sikap saling belajar dalam memahami kondisi masyarakat itu sendiri sehingga membentuk kerangka cara pandang yang sama dan sinergis.



#### 4. Analisis Data

Selanjutnya data dianalisis dengan teknik analisis interaktif (Miles & Huberman, 1992) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.

#### 5. Tingkat Kesiapterapan Teknologi

Penelitian ini akan menghasilkan pola/model interelasi kebijakan pengembangan industri kelapa (coconut industry) di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Dari produk tersebut, penulis menetapkan tingkat keterserapan teknologi pada tingkatan ke (7).

## G. JADWAL KEGIATAN PENELITIAN

Jadwal Kegiatan:

### Jadwal Penelitian Tahun 1 (Pertama)

No	Uraian Kegiatan	Jadwal Kegiatan/Bulan					
		1	2	3	4	5	6
A	Penelitian Pendahuluan	X					
	1. Penulisan Proposal	X					
	2. Survei Lapangan		X				
	3. Pengolahan data awal (sekunder)		X				
	4. Pengumpulan Data						
B	Penelitian Pendalaman						
	1. Interpretasi data			X			
	2. Pelaksanaan FGD			X	X		
	3. Interpretasi data lanjutan				X		
	4. Penulisan laporan					X	
	5. Seminar hasil						
C	Revisi dan Pengiriman Laporan						X

### Jadwal Penelitian Tahun 2 (Kedua)

No	Uraian Kegiatan	Jadwal Kegiatan/Bulan					
		1	2	3	4	5	6
A	Penelitian Pendahuluan	X					
	1. Penulisan Proposal	X					
	2. Survei Lapangan		X				
	3. Pengolahan data awal (sekunder)		X				
	4. Pengumpulan Data						
B	Penelitian Pendalaman						
	1. Interpretasi data			X			
	2. Pelaksanaan FGD			X	X		
	3. Interpretasi data lanjutan				X		
	4. Penulisan laporan					X	
	5. Seminar hasil						
C	Revisi dan Pengiriman Laporan						X

## H. DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto. 1995. *Manfaat Pengembangan Studi Kebijakan Publik untuk Pembangunan Daerah*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Analisis Kebijakan Sosial, Pusat Penelitian Kependudukan UGM: Yogyakarta
- Budi Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. MedPress: Yogyakarta,

- M Irfan Islamy. 2001. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*, Bumi Aksara: Jakarta
- Randall B Ripley. 1985. *Policy Analysis in Political Science*, Nelson-Hall Publishers Chicago.
- Riant D Nugroho. 2009. *Public Policy*. Gramedia: Jakarta
- Soenarko, 1998. *Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijakanaksanaan Pemerintah*. Papyrus: Surabaya
- William D. Coplin dan Michael K.O’Leary (dalam Yeremias T Keban, 1995, *Analisis Peran Dalam Seleksi Alternatif Kebijakan*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Analisis Kebijakan Sosial, Pusat Penelitian Kependudukan UGM Yogyakarta)

## I. REKAPITULASI BIAYA

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang Diusulkan (Rp)	
		Tahun ke -1	Tahun ke - 2
1	Pembelian Bahan Habis Pakai (ATK, Fotocopy, Surat Menyurat, Penyusunan Laporan, Cetak, Penjilidan Laporan, Persiapan Publikasi )	12,035,000	12,035,000
2	Pelaksanaan Pengumpulan Data	45,025,000	45,025,000
3	Analisis Data	10,500,000	10,500,000
4	Pelaporan luaran Wajib dan luaran tambahan	32,440,000	32,440,000
<b>Jumlah</b>		<b>100,000,000</b>	<b>100,000,000</b>
<b>Jumlah Usulan Anggaran</b>		<b>200,000,000</b>	

## J. SUSUNAN ORGANISASI DAN PEMBAGIAN TUGAS TIM PENELITIAN

NO	Nama	Instansi Asal	Bidang Tugas	Uraian Tugas
1.	Dr. H. Seno Andri, M.Si	Universitas Riau	Ketua Tim Pengusul	Pengarah penelitian secara keseluruhan, menjalin Kerjasama dengan stakeholder (bidang pemerintah, swasta, dan masyarakat), presentator seminar hasil
2	Prof. Dr. H. Sujianto, M.Si	Universitas Riau	Anggota Pengusul 1	Narahubung stakeholder, analisis data dan pengolahan data yang berkaitan dengan Industri Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir, pengumpulan data sekunder yang bersumber dari stakeholder dan sebagai penyusun dan perencana

NO	Nama	Instansi Asal	Bidang Tugas	Uraian Tugas
				anggaran penelitian
3	Drs. Endang Sutrisna, M.Si	Universitas Riau	Anggota Pengusul 2	Dokumentasi, kolektor data, analisis data yang berkaitan dengan pemerintah, korporasi dan masyarakat, kebijakan pemerintah, terkait hilirisasi Industri Kelapa Kabupaten Inhu
4	Helen Susra, S.Sos	Universitas Riau	Pembantu Lapangan	Mengikuti arahan anggota 1
5	Arif Budi Setiawan, S.AP	Universitas Riau	Pembantu Lapangan	Mengikuti arahan anggota 2

#### **K. JUSTIFIKASI ANGGARAN PENELITIAN**



No	Uraian	Vol	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)	Pajak			
						PPn		PPH 21,22,23	
						%	Rp	%	Rp
<b>A</b>	<b>Bahan</b>								
	ATK	2	Paket	1,267,500	2,535,000	10%	253,500	3%	76,050
	Dokumentasi	1	Paket	1,500,000	1,500,000	10%	150,000	3%	45,000
	Sekretariat	12	Bulan	300,000	3,600,000	10%	360,000	4%	144,000
	Cetak Spanduk dan Poster	2	Paket	1,200,000	2,400,000	10%	240,000	3%	72,000
	Penggandaan Data Sekunder	2	Paket	1,000,000	2,000,000	10%	200,000	3%	60,000
	<b>Sub total</b>				<b>12,035,000</b>				
<b>B</b>	<b>Pelaksanaan Pengumpulan Data</b>								
	Tenaga Surveyor	150	Kuesioner	8,000	1,200,000			4%	48,000
	Pembantu Peneliti	20	OH	80,000	1,600,000				
	FGD Penelitian	1	Paket	12,000,000	12,000,000				
	Biaya Adm Di Desa	4	Paket	1,000,000	4,000,000				
	Akomodasi Pengumpulan Data	10	OH	350,000	3,500,000				
	Sewa Kendaraan (BBM, Driver, Mobil)	15	Perhari	875,000	13,125,000			4%	525,000
	Perizinan (Provinsi, Kabupaten, Desa)	12	Paket	800,000	9,600,000				
	<b>Sub total</b>				<b>45,025,000</b>				
<b>C</b>	<b>Analisis Data</b>								
	Pengolahan Data Primer	4	Paket	1,050,000	4,200,000			4%	168,000
	Pengolahan Data Sekunder	2	Paket	1,050,000	2,100,000			4%	84,000
	Tenaga Administrasi 1	60	OJ	35,000	2,100,000			5%	105,000
	Tenaga Administrasi 2	60	OJ	35,000	2,100,000			5%	105,000
	<b>Sub total</b>				<b>10,500,000</b>				
<b>D</b>	<b>Pelaporan luaran wajib dan luaran tambahan</b>								
	Penggandaan Draft Laporan	8	Eks	80,000	640,000	10%	64,000	3%	19,200
	Penggandaan Laporan Kemajuan	10	Eks	85,000	850,000	10%	85,000	3%	25,500
	Penggandaan Laporan Akhir	10	Eks	95,000	950,000	10%	95,000	3%	28,500
	Pembuatan Artikel Conference	1	Paket	2,000,000	2,000,000	10%	200,000	3%	60,000
	Pembuatan Artikel Internasional	1	Paket	23,000,000	23,000,000	10%	2,300,000	3%	690,000
	Seminar Internasional	1	Paket	4,500,000	4,500,000	10%	450,000	3%	135,000
	Haki	1	Paket	500,000	500,000	10%	50,000	3%	15,000
	<b>Sub total</b>				<b>32,440,000</b>				
	<b>JUMLAH</b>				<b>100,000,000</b>		<b>4,447,500</b>		<b>2,405,250</b>